

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pandemi Covid – 19 merupakan permasalahan yang memengaruhi kehidupan masyarakat terutama dalam hal perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah telah merancang program bantuan sosial untuk membantu masyarakat guna mencukupi kebutuhan mereka. Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial yang terdapat di Desa Pasekaran, yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Bantuan Sosial Tunai Pusat dilakukan dengan baik, yang prosesnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2020 tentang penyaluran bantuan sosial. Adapun proses penyaluran program bantuan sosial di Desa Pasekaran dilakukan dengan berbagai rangkaian tahapan, mulai dari penentuan anggaran, sasaran target, sosialisasi, pendataan, verifikasi dan validasi, sampai pelaporan kegiatan penyaluran bansos yang sudah dilaksanakan.

1. Penetapan anggaran dan sasaran target, dalam hal ini Pemerintah Desa Pasekaran telah menentukan dan melaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan Indonesia dengan target yaitu disesuaikan dengan DTKS untuk BST dan BLT mencakup masyarakat ter-PHK, kurang mampu, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang tidak menerima bantuan tunai ataupun non – tunai dari manapun.
2. Sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik, bersama pihak – pihak terkait meliputi kepala desa, aparatur desa, pihak penyalur BST, ketua RT, ketua RW, dan calon penerima bantuan, sebagai wadah komunikasi untuk menyampaikan informasi penyaluran bantuan sosial, dengan maksud untuk menghindari adanya disinformasi mengenai penyaluran bantuan sosial. Adapun materi yang disampaikan lengkap mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial. Selain itu juga, sosialisasi ini tidak melibatkan dinas sosial di dalamnya.
3. Pendataan dilakukan dengan baik. Ketua RT/RW melakukan pendataan bagi warga yang belum mendapatkan bantuan. Adapun data yang didapatkan diberikan kepada Pemerintah Desa, dan perangkat desa memastikan data tersebut sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan, yaitu keluarga miskin non DTKS bagi BLT, dan untuk BST disesuaikan dengan nama yang sudah terdaftar dalam DTKS. Pendataan dilakukan oleh petugas Tim Covid – 19 dengan diketuai oleh koordinasi pendataan.

4. Verifikasi dan validasi data, berjalan dengan baik. Data yang telah terkumpulkan dari Pendataan dimusyawarahkan melalui Musyawarah Desa Khusus untuk BLT. Untuk BST data diberikan kepada dinas sosial untuk disampaikan kepada Kementerian Sosial. Adapun Persyaratan administrasi yang dibutuhkan dari calon penerima terkumpul dan terdata dengan baik.
5. Pemberian bantuan sosial disalurkan dengan baik sesuai anggaran yang dialokasikan. Tidak terdapat pemotongan dana dari organisasi pelaksana dan pihak penyalur, di mana semua bantuan diserahkan semua kepada calon penerima. Tidak semua penerima BST memiliki Rekening Bank, sehingga sebagian diberikan melalui Kantor Pos. Terdapat jangkauan waktu dalam pemberian bantuan sosial tersebut, jika tidak segera diambil maka uang akan kembali dalam kas negara.
6. Pembuatan laporan dapat digunakan untuk evaluasi pelaksanaan program. Namun, belum secara rinci dalam penjelasan mengenai evaluasi tersebut. Pelaporan penyaluran bantuan sosial telah dilakukan dan diserahkan dengan baik kepada instansi atas dengan isi mengenai besar anggaran yang dibagikan, data nama penerima, dokumentasi kegiatan, tanda bukti penerima berupa dokumentasi foto penerima yang diberikan kepada Bupati melalui Camat untuk BLT, sedangkan untuk BST, Pemerintah Desa tidak bertanggungjawab dalam pelaporan karena secara otomatis status penerimaan akan masuk ke pusat.

Dalam proses penyaluran bantuan sosial di Desa Pasekaran pada dasarnya terdapat faktor yang memengaruhi yaitu akuntabilitas dan transparansi. adanya pemenuhan tanggungjawab pemerintah desa dalam menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui sosialisasi, menjalankan kewajiban sebagai petugas untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, serta melaporkan dan menyerahkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kegiatan kepada Bupati untuk BLT. Kemudian adanya keterbukaan dari petugas dan masyarakat dalam program bantuan sosial baik dari penyediaan informasi dan komunikasi melalui upaya pemberian informasi melalui media yang ada, seperti papan pengumuman atau media komunikasi online. Sehingga, dalam hal ini memberikan dampak bagi proses berlangsungnya penyaluran bantuan sosial, yaitu masyarakat mendapatkan informasi yang memadai melalui transparansi dan pemerintah desa diharuskan bekerja sesuai tugasnya sebagai bentuk akuntabilitas sebagai pelaksana.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, proses penyaluran program bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid - 19 di Desa Pasekaran memiliki hambatan yang dihadapi yaitu masalah penyediaan dan penyebaran informasi karena terdapat warga yang belum mampu mempunyai alat telekomunikasi yang baik dan Pemerintah Desa tidak menyediakan website resmi terkait pandemi Covid – 19. Dalam hal ini, Pemerintah Desa telah mengupayakan berbagai cara untuk menyediakan informasi melalui media yang sudah ada, baik itu melalui papan pengumuman maupun menyebarkan informasi melalui *face to face* ke setiaparganya. Sehingga, antara petugas dan penerima tidak ada miskomunikasi dan disinformasi. Dari berbagai upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan proses penyaringan bantuan sosial di Desa Pasekaran tersebut, ada beberapa saran dari peneliti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk program penyaluran bantuan sosial selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam masa pandemi, informasi sangat diperlukan untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa sebaiknya mempunyai website resmi yang memuat informasi mengenai pandemi Covid – 19 dan penyaluran bantuan sosial, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengaksesnya.
2. Untuk menghindari disinformasi, pemerintah desa perlu menyediakan papan pengumuman atau informasi di setiap RT di Desa Pasekaran dan bukan hanya tersedia di Balai Desa, sehingga masyarakat yang belum mempunyai kemampuan memiliki alat komunikasi yang memadai akan mudah untuk melihat dan membaca setiap informasi yang dibagikan